

Rencana Kerja Awal 2026



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dapat menyusun Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 yang merupakan salah satu kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap tahun.

Rencana Kerja Awal Tahun 2026 ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Awal ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selama satu tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Kuala

Kami menyadari baik bentuk, isi dan cara penyajian Rencana Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja akan kami terima dengan baik

Demikian Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini dibuat, semoga bisa menjadi bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Marabahan, Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



MUHAMMAD SYA'RAWI, SSTP
NIP. 198204142001121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU | 9 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja | 9 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja | 28 |
| 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.. | 38 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 42 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 51 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 52 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 52 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja..... | 54 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 56 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA..... | 69 |
| BAB V PENUTUP | 78 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Awal SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Awal SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..

Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak tahapan awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah, yang menegaskan bahwa tiap Perangkat Daerah wajib membentuk Tim Penyusun Renja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Tim Penyusun tersebut kemudian bekerja menyusun Rencana Kerja dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Ke 1 yaitu :

“Terwujudnya Barito Kuala yang adil Maju dan Madiri berbasis Agribisnis dengan misi mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan Sumber Daya Lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan”.

1.2 Landasan Hukum

Penyusun Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 berlandaskan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 11. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 12. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah BerAwal Pada Tahun 2022
 13. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutawalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatu Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026

21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024
23. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026, sedangkan tujuannya sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;

3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Analisis Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta targetkinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barito Kuala melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Tingkat capaian target kinerja program/ kegiatan sampai dengan keadaan bulan Desember tahun 2024 dapat terealisasi fisik **99.91%** dan prosentasi penggunaan Keuangan sebesar **95,27 %**. Dari pagu anggaran kegiatan tahun 2024 sebesar **Rp. 12.950.283.597,00** dan anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 12.337.843.860,00** Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai .

Pada tahun 2024 Sampai Dengan bulan Desember Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 pada bulan Desember/ Triwulan IV berdasarkan Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan PMD 90/2019 sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Belanja ini berupa perjalanan dinas , rapat Koordinasi terkait SAKIP dan Atk yang terealisasi sebesar Rp. 34.396.100,- (99,58%) dari pagu Rp. 34.539.930,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja (TPP) sampai dengan bulan Desembertahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp 6.674.622.573,00 (93,02%) dari Pagu sebesar Rp 7.175.655.662,00

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan**

Belanja Bimtek sampai bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 63.716.710,00 (99,97 %) dari pagu sebesar Rp. 63.738.000,00

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen instalasi Listrik

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini digunakan untuk belanja alat instalasi listrik sebesar Rp. 720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 720.000,00 (100%)

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,00 untuk belanja/biaya alat tulis kantor dan spanduk 19 jenis Dengan Realisasi fisik sebanyak 19 Jenis (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.825.000, 00 (99,73%).

Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.695.000,00 untuk belanja/biaya makan dan minum harian pegawai, rapat dan rapat tamu sebanyak 36 Paket. Dengan Realisasi fisik sebanyak 35 Paket (97,22%) dan keuangan sebesar Rp86.505.000,00 atau 96,44 %

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.127.940,00, Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetak dan penggandaan 21 Jenis. Dengan Realisasi fisik 21 Jenis atau (100%) dan Rp. 13.127.940,00 atau (100%).

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.180.887.350,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Prajake provinsi dan luar provinsi sebanyak 24 laporan. Dan kegiatan Pemilu Kepala Daerah untuk Pengamanan ke TNI Marabahan Dengan Realisasi fisik 100 % sebesar Rp. 2.180.850.165,00 atau. 100 %.

5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 492.610.000,00 untuk pengadaan Kendaraan dinas Patwal 1 Unit, dan terealisasikan sebanyak 1 unit 100,00 % dan keuangan sebesar Rp. 450.000.000,00 (91,35%).

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.000.000,00 untuk pengadaan AC SPLIT 1 PK 2 Unit dan terealisasikan sebanyak 2 unit 100 % dan keuangan sebesar Rp. 12.000.000,00 (100%).

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.310.000,00 untuk pengadaan PC UNit 2 Unit dan terealisasikan sebanyak 2 unit 100 % dan keuangan sebesar Rp. 22.310.000,00 (100%).

6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyediaan Jasa Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.200.00,00 kegiatan ini melaksanakan 12 Laporan , dengan realisasi 12 laporan (100%) dan keuangan sebesar Rp. 18.500.00,00 (65,60%).

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 bulan . Dengan Realisasi sebesar Rp. 20.228.555,00 atau 51,87 %

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.855.248,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 12.269.800,00 atau 95,45 %

7. Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 225.138.650,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

sebanyak 18 unit. Dengan Realisasi sebesar Rp. 223.113.950,00 atau 99,10%

Pemeliharaan rutin /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 216.925.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Unit. Dengan Realisasi sebesar Rp. 216.875.000,00 atau 99,98%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.370.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor Laptop, PC Unit dan Printer sebanyak 10 Unit. Dengan Realisasi sebesar Rp. 9.352.400,00 atau 99,81%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.050.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan AC sebanyak 5 Unit. Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.050.000,00 atau 100%

B Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 298.221.500,00. Kegiatan ini berupa kegiatan penertiban sepanjang jalan kabupaten barito kuala sebanyak 24 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 297.958.268,00 (99,91%).

Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 691.200.000,00. Kegiatan ini berupa kegiatan Pengawasan kabupaten barito kuala sebanyak 7 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 661.500.000,00 (95,70%).

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 198.513.050,00 sebanyak 18 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 198.211.505,00 (99,85%).

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 58.791.790,00 sebanyak 6 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 57.668.391,00 (98,09%).

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 151.710.465,00 sebanyak 160 Orang. Dengan Realisasi sebesar Rp. 150.862.028,00 (99,44%).

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.539.750,00 sebanyak 4 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 84.415.900,00 (99,85%).

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 74.569.245,00 sebanyak 12 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 74.399.050,00 (99,77%).

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 74.753.375,00 sebanyak 12 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 74.678.650,00 (99,90%).

B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 630.201.190,00 sebanyak 4 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 629.030.275,00 (99,81%).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pergeseran/perubahan anggaran akibat penambahan anggaran sehingga mempengaruhi pada target yang akan direalisasikan.

Pembagian anggaran/persediaan kas kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan pada triwulan I dan II tidak dapat dilaksanakan pada triwulan IV yang dikarenakan antara lain :

Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang anggarannya dihapus, dikurangi, dan digeser pelaksanaannya ke triwulan III dan IV untuk menyesuaikan waktu, prioritas dan azas manfaatnya, sehingga dengan sisa pagu anggaran yang ada dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Berikut ini diuraikan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi senilai Rp. Rp34.396.100,00 (99,58%)

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sampai dengan keadaan bulan Desember 2024, realisasi sebesar 728 Orang (100 %) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.674.622.573,00,- (93,02%)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan keadaan bulan Desember 2024, realisasi sebesar 8 Orang (100 %) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.716.710,- (99,97%)

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan bulan Desember 2024, realisasi fisiknya 19 Paket (100 %) dan realisasi keuangan Rp. 64.825.000,- (99,73%).
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik sampai dengan bulan Desember 2024, realisasi fisiknya 35 Paket (97,22%) dengan realisasi Keuangan Rp. 86.505.000,-(96,44%)

Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan Rp. 450.000.000,00 atau (91.35%) karena kegiatan ini

penambahan anggaran dan di realisasikan di Triwulan III serta harga menyesuaikan harga di dealer tersebut.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sampai dengan keadaan bulan Desember 2024, realisasi secara fisik 12 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.500.000,- (65,60%). Karena ada Tenaga harian Lepas yang lulus PPPK mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran THL
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sampai dengan keadaan bulan Desember 2024, realisasi secara fisik 12 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.228.555,- (51,87%).
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Sampai dengan keadaan bulan Desember 202, realisasi secara fisik 12 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.926.400,- (94,37%).

Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sampai dengan bulan Desember 2024 dengan realisasi keuangan Rp. 223.113.950,- atau (99,10%)

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi fisik 1 Unit (100%) dengan realisasi keuangan Rp. 216.875.000,- (99,98%)
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 9.352.400,- (99,81%)

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sampai dengan bulan Desember 2024 dengan realisasi fisik 24 Laporan dan realisasi keuangan Rp. 297.958.268,00 (99,91%).
- Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sampai dengan bulan Desember 2024 dengan realisasi fisik 7 Laporan dan realisasi keuangan Rp. 661.500.000,00 (95,70%).

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Desember 2024 realisasi fisik 7 Laporan. Kegiatan dan realisasi keuangan Rp. 198.211.505,- (99,85%)
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai bulan Desember 2024 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 57.668.391,- (98,09%).
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sampai bulan Desember 2024 dengan realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 150.862.028,00 (99,44%)
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai bulan Desember 2024 realisasi Fisik 4 Dokumen dan realisasi Keuangan Rp. 84.415.900,- (99,85%)

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sampai bulan Desember 2024 dengan realisasi Fisik 12 Laporan atau 100% dengan realisasi Keuangan Rp. 74.399.050,- (99,77%)
- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sampai dengan bulan Desember 2024 dengan realisasi Fisik 12 Laporan atau 100% dan realisasi keuangan Rp. 74.678.650,- (99,90%)

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sampai bulan Desember 2024 dengan realisasi fisik 6 Dokumen atau 100% dan realisasi keuangan Rp. Rp. 629.030.275,- (99,81%)

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada karena realisasi anggaran masih dibawah 90 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.200.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran Honora THL dan Pembelian Materai selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 18.500.000, 00 atau 65,60 % karena adanya THL yang lulus PPPK mengakibatkan tidak terealisasinya honor THL tahun 2024

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 20.228.555,00 atau 51,87 % karena tagihan langganan listrik pembayarannya menurut besarnya pemakaian

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi/memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada karena realisasi anggaran belum ada 100% %

Penyediaan Komponen instalasi Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 720.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembelian alat instalasi listrik sebanyak 1 Paket selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 720.000,00 atau 100

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.127.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran penggandaan dan pembelian spanduk Tata kota selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 13.127.000,00 atau 100 %

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.180.887.350,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran perjalanan dinas dan pengamanan Pilkada Tahun 2024 kepada TNI selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.180.850.165,00 atau 100 %

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.310.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembelian pengadaan PC. Unit 2 unit selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 22.310.000,00 atau 100 %

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembelian pengadaan AC 2 Unit selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100 %

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Dari uraian di atas di ketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, 3 (Tiga) program 10 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang keluarannya tidak mencapai 100%. Dikarenakan beberapa sebab antara lain : program dan kegiatan tersebut adanya (realisasi sampai bulan Desember 2024), penambahan / pengurangan anggaran dan terjadi pergeseran anggaran kas pada triwulan IV .

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.

Implikasinya dalam capaian program renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Prajasangat mendukung dalam pencapaian program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dapat menunjang sarana dan prasarana Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja. Maka dengan adanya sarana penunjang akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Maklumat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan sesuai target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Akan tetapi pada pelaksanaan tahun ini, beberapa kegiatan yang ada tidak mencapai target yang ditetapkan.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang perlu diambil yaitu dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna tercapainya kegiatan yang sudah direncanakan, dan melakukan perubahan target untuk menyesuaikan dengan anggaran tersebut.

f. Terdapatnya pembayaran yang disesuaikan hari kerja dan sesuai tagihan

Dari Penjelasan tersebut dapat digambarkan pada tabel 2.1 (Capaian Realisasi Tahun Sebelumnya), sebagai berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Triwulan IV berdasarkan target Indikator kinerja program dan kegiatan

| No | PMDN 90/2019 Kegiatan – Sub Kegiatan | Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) Triwulan IV | |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Pelaporan | 10.687.783.232,00 | 10.109.119.793,00 | 96,35 | 94,59 |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu | 34.539.530,00 | 34.396.100,00 | 100 | 99,58 |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 34.539.530,00 | 34.396.100,00 | 100 | 99,58 |
| | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.175.655.662,00 | 6.674.622.573,00 | 100% | 93,02% |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7.175.655.662,00 | 6.674.622.573,00 | 100% | 93,02% |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Pelaporan | 63.738.000 00 | 63.716.710,00 | 100% | 99,97% |
| | Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 63.738.000,00 | 63.716.710,00 | 100% | 99,97% |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.349.430.290,00 | 2.346.028.105 00 | 99,44% | 99,23% |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 720.000,00 | 720.000,00 | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 65.000.000,00 | 64.825.000,00 | 100% | 99,73% |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 89.695.000,00 | 86.505.000,00 | 97,22% | 96,44% |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 13.127.940,00 | 13.127.940,00 | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.180.887.350,00 | 2.180.850.165,00 | 100% | 100% |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 526.920.000,00 | 484.310.000,00 | 100% | 97% |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 492.610.000,00 | 450.000.000,00 | 100% | 91,35% |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesinyang tersedia | 22.310.000,00 | 22.310.000,00 | 100% | 100% |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.016.100,00 | 53.654.955,00 | 100% | 70,62 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 28.200.000,00 | 18.500.000,00 | 100% | 65,60 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 39.000.000,00 | 20.228.555,00 | 100% | 51,87 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 15.816.100,00 | 14.926.400,00 | 100% | 94,37 |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 454.483.650,00 | 452.391.350,00 | 100% | 99,54% |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 225.138.650,00 | 223.113.950,00 | 100% | 99,10% |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 216.925.000,00 | 216.875.000,00 | 100% | 99,98% |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9.370.000,00 | 9.352.400,00 | 100% | 99,81% |
| | Sub Kegiatan : emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 100% | 100% |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kecamatan dengan kondisi Tenram dan Tertib | 1.632.299.175,00 | 1.599.693.792,00 | 100% | 99,32% |
| | Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kecamatan dengan kondisi Tenram dan Tertib | 1.482.976.555,00 | 1.450.616.092,00 | 100% | 98,81% |
| | Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 298.221.500,00 | 297.958.268,00 | 100% | 99,91% |
| | Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 691.200.000,00 | 661.500.000,00 | 100% | 95,70% |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 198.513.050,00 | 198.211.505 | 100% | 99,85% |
| | Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 58.791.790,00 | 57.668.391,00 | 100% | 98,09% |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 151.710.465,00 | 150.862.028,00 | 100% | 99,44% |
| | Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 84.539.750,00 | 84.415.900,00 | 100% | 99,85% |
| | Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti | 149.322.620,00 | 149.077.700,00 | 100% | 99,84% |
| | Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 74.569.245,00 | 74.399.050,00 | 100% | 99,70% |
| | Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 74.753.375,00 | 74.678.650,00 | 100% | 99,90% |
| III | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Penanggulangan Kebakaran | 630.201.190,00 | 629.030.275,00 | 100% | 99,81% |
| | Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanggulangan Kebakaran | 630.201.190,00 | 629.030.275,00 | 100% | 99,81% |
| | Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 630.201.190,00 | 629.030.275,00 | 100% | 99,81% |

Tabel 2.2 (T.C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja S/D Tahun 2024 (bulan Desember)
Kabupaten Barito Kuala**

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Berdasarkan PMDN 90) | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Awal periode Renstra PD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3) | Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu S.D Septemberi (2024) (tahun-2) | | | Target program / kegiatan (Renja PD tahun berjalan 2025 (n-1)) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | | Catatan |
|---------------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target renja PD tahun 2024 (n-2) | Realisasi renja PD tahun 2024 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4)* | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip Satpol PP | 81% | | | | | | | | |
| 1.05.01.205.1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu | 1 | | | | | | | | |
| 01.20.5.1.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2912 | 728 | 728 | 728 | 100% | 728 | 2184 | 75% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------|-------|----|----|--------|----|-------|--------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Awal Tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan Awal tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan Awal tahun SKPD | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 75% | |
| 01.20.5.1 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu | 1 | | | | | | | 0% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan Awal tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan Awal tahun SKPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 75% | |
| 1.05.01.205.1 1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persenatse realisasi Administrasi Kepegawaian | 100% | | | | | | 0 | 0% | |
| 01.20.5.1 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yg ditugaskan mengikuti Bintek/ Diklat | 29 | 3 | 8 | 8 | 100% | 0 | 11 | 37,93% | |
| 1.05.01.2.02.01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Administrasi umum | 100% | | | | | | | 0% | |
| 1.05.01.2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 | 3 | 1 | 1 | 0% | 3 | 7 | 77,77% | |
| 1.05.01.2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 58 | 19 | 19 | 19 | 100% | 10 | 48 | 82,76% | |
| 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 13474 | 13434 | 36 | 35 | 97,22% | 2 | 13471 | 99,98% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------|----|----|----|------|----|-----|--------|--|
| 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 38 | 7 | 21 | 21 | 100% | 3 | 31 | 81,58% | |
| 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Surat Kabar Harian yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 138 | 90 | 24 | 24 | 100% | 12 | 126 | 91,30% | |
| 1.05.01.2.06.09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Realisasi Pengadaan BMD | 100 | 56 | 14 | 10 | 71% | | 0 | 0% | |
| 1.05.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 100% | |
| 1.05.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 58 | 36 | 0 | 0 | 0% | 2 | 38 | 65,52% | |
| 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | 8 | 2 | 2 | 100% | 0 | 10 | 62,50% | |
| 1.05.01.2.07.011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 20% | |
| 1.05.01.2.07.06 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|----|----|----|--------|----|----|--------|--|
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 75% | |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 75% | |
| 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 75% | |
| 1.05.01.2.08.04 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD | 100% | | | | | | 0 | 0% | |
| 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 73 | 18 | 19 | 18 | 94,74% | 19 | 55 | 75,34% | |
| 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 75% | |
| 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 14 | 0 | 10 | 10 | 100% | 6 | 10 | 71,43% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|----|----|----|------|----|----|--------|--|
| 1.05.01.2.09.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 10 | 83,33% | |
| 1.05.01.2.09.09 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kecamatan yang tentram dan Terib | 100% | | | | | | 0 | 0% | |
| 1.05.02 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 72% | | | | | | 0 | 0% | |
| 1.05.02.2.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 80 | 20 | 24 | 24 | 100% | 12 | 56 | 70% | |
| 1.05.02.2.01.02 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 27 | 7 | 7 | 7 | 100% | 6 | 20 | 74,07% | |
| | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang terdampak Perda dan Perkada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|--|
| 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 70 | 30 | 18 | 18 | 100% | 4 | 52 | 74,29% | |
| 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 34 | 12 | 6 | 6 | 100% | 4 | 22 | 64,71% | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya | 610 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 920 | 610 | 160 | 160 | 100% | 150 | 920 | 100% | |
| 1.05.02.2.01.06 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 16 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 75% | |
| 1.05.02.2.01.07 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 65% | | | | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----|----|----|----|------|----|----|-----|--|
| 1.05.02.2.02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 75% | |
| 1.05.02.2.02.02 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 75% | |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Perda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan perkara | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 1.05.02.2.02.03 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persenatse Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 65% | | | | | | 0 | 0% | |
| 1.05.04 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persenatse Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 65% | | | | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----|---|---|---|------|---|----|---------|--|
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 19 | 5 | 6 | 6 | 100% | 4 | 15 | 78,95,% | |
|--------------|--|---|----|---|---|---|------|---|----|---------|--|

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam Rencana Kerja RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah

1. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan dengan Indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Sakip Satpol PP

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator sasaran Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP

Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito

Kuala adalah

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Satpol PP

Untuk mengukur indikator tersebut di atas, metode yang dilakukan akan disajikan pada tabel analisis pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prajadengan format tabel 3. (T-C.30) Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

Tabel 2.3

T-C.30 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

| NO | Indikator | SPM / standar nasional | Indikator Kinerja Kunci | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| | | | | Tahun 2022 (tahun n-2) | Tahun 2023 (tahun n-1) | Tahun 2024 (tahun n) | Tahun 2025 (tahun n+1) | Tahun 2022 (tahun n-2) | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| | | | | | | | | | (tahun n-1) | (tahun n) | (tahun n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jumlah program yang direalisasikan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib | | | 72 | 100 | 100 | 100 | 81,69 | | | | |
| 3 | Persentase Kecamatan yang diawasi | | | 60 | 100 | 100 | 100 | 81,69 | | | | |
| 4 | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | 75 | 100 | 100 | 100 | 133,33 | | | | |
| 5 | Persentase Kepatuhan Masyarakat di Kecamatan Terhadap Perda dan Perkada | | | | 100 | 100 | 100 | 106,23 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 6 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 7 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| 8 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 18 | 18 | 18 | | | | | |
| 9 | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 10 | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 11 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 12 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 13 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 14 | | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | | | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 15 | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | | | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 16 | | Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran | | | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----|-----|--|---|---|--|--|
| 17 | | | Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 18 | | | Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| 19 | | | Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| 20 | | | Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota | 23 | 80 | 23 | | 1 | 2 | | |
| 21 | | | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 22 | | | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----|-----|--|---|---|--|--|
| 23 | | Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| 24 | | Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 25 | | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani | | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 26 | | Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan | | 4 | 4 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 27 | | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS | | 5 | 5 | 5 | | 1 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-----|-----|-----|--|---|---|--|--|
| 28 | | | Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota | | 4 | 4 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 29 | | | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana | | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 30 | | | Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 31 | | | Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 32 | | | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 33 | | | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | | 30 | 30 | 30 | | | | | |

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Pencapaian indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel 5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024
(s.d bulan Desember 2024)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | % | 60% | 100% | 166,67% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD | Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja | % | 77% | 75,41% | 97,94% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran belum mencapai target tahun 2024.

Capaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 ini juga didukung dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yakni :

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
2. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perindugan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

6. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
8. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
9. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja ini juga didukung dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yakni :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Sub Kegiatan nyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
10. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
11. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Perjalanan selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala telah melalui beberapa fase perkembangan yang terus meningkat, melalui Pengawasan dan pengendalian atas sasaran strategis yaitu meningkatnya penyelesaian Pelanggaran K3 . Isu Strategis yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yang dapat kami uraikan sebagai isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten barito Kuala

Analisis capaian kinerja ini untuk menginstrumenkan masalah serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan baik faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis capaian kinerja dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, maka faktor internal dan eksternal tersebut dirumuskan beberapa hal penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala antara lain:

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Profesionalitas Aparatur

Perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan yang memadai dimana Pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan, melihat tuntutan tugas yang diemban kedepan semakin berat. Perlunya mempunyai sikap mental yang baik dimana motivasi kerja dan disiplin serta penguasaan bidang tugas masih rendah, serta masih banyak yang belum mengerti dan memahami akan segala aturan-aturan yang ditegakan.

2. Kurangnya jumlah Personil

Tidak memadainya jumlah personil yang ada dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini dapat diukur dari kriteria perhitungan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

3. Belum tersedianya pos jaga di titik-titik penjagaan

4. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten

5. Sarana dan Prasarana yang ada tidak maksimal mendukung kegiatan lapangan

6. Belum adanya ruang khusus untuk proses penyidikan
7. Masih belum maksimal untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di jalur Hijau/ Badan jalan

Adapun kriteria perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, sesuai pasal 11 ayat b, maka jumlah pegawai (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala mestinya sebanyak 251 sampai 350 pegawai. Sedangkan jumlah yang ada hanya berjumlah 80 personil, dengan persentasi masih kekurangan personil yaitu mencapai 68% dari jumlah minimal yang ditetapkan sekitar 251 orang. Akibatnya pengawasan dan monitoring serta operasional lainnya kurang maksimal pencapaian pelaksanaannya.

1. Penempatan Personil

Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS paada umumnya, oleh karena itu kedepan diperlukan pengadaaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).

2. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai.

Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (ALS) dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berupaya mengenal dan mempelajari Lingkungan Internal Organisasi

berupa Kekuatan dan Kelemahan, dan Lingkungan Eksternal Organisasi berupa Peluang dan

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Barito Kuala

Analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2026 ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 melalui proses internal tanpa mengesampingkan usulan Program dan Kegiatan dari Bidang-bidang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidaklah jauh berbeda.

Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 ini sudah dianggarkan sesuai Kebutuhan dan sesuai program dan kegiatan yang ada di Renstra Satuan Polisi Pamong Prajawalaupun untuk program dan kegiatan harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Untuk Perbandingan anggaran antara rancangan awal rencana kerja dan kesesuaian pagu Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa ditetapkan karena untuk ketetapan Pagu anggaran belum ada. Jadi untuk membandingkan antara rancangan awal tahun 2026 dengan kesesuaian kebutuhan belum bisa dibandingkan, dapat dilihat pada table 2.6 T-C. 31 Permendagri 86 tahun 2017 di bawah ini :

Tabel 2.6

T-C.31 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

**Tabel TC. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Barito Kuala**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|-----------|--|----------------|--------------------------|--|-----------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| No | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 11.620.556.506 | | | | | 11.620.556.506 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 11.620.556.506 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 11.620.556.506 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Marabahan | Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu | 1 Lap | 9.603.238.236 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Marabahan | Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu | 1 Lap | 9.603.238.236 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----------|---------------|---|-----------|--|----------|---------------|--|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Keuangan | 100 | 9.303.238.236 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Keuangan | 100 | 9.303.238.236 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Marabahan | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 52 Orang | 9.303.238.236 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Marabahan | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 52 Orang | 9.303.238.236 | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Marabahan | Nilai evaluasi SAKIP | 81 | 9.500.000 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Marabahan | Nilai evaluasi SAKIP | 81 | 9.500.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Marabahan | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Lap | 9.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Marabahan | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Lap | 9.500.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Kepegawaian | 100% | 0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Kepegawaian | 100% | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|----------|--------------------|--|----------------------|--|----------|--------------------|--|
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jakarta dan Bandung' | Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang | 0 Orang | 0 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jakarta dan Bandung' | Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang | 0 Orang | 0 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Umum | 100% | 197.883.500 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Marabahan | Persentase Administrasi Umum | 100% | 197.883.500 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Marabahan | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | 19 Paket | 25.034.410 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Marabahan | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | 19 Paket | 25.034.410 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Marabahan | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 2 Paket | 89.820.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Marabahan | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 2 Paket | 89.820.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Marabahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Marabahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 500.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Marabahan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 Paket | 750.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Marabahan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 Paket | 750.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------|-------------------|---|------------------------------|--|------------|-------------------|--|
| | Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Banjarbaru, Jakarta, Bandung | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Laporan | 81.779.090 | Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Banjarbaru, Jakarta, Bandung | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Laporan | 81.779.090 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Marabahan | Persentase Pengadaan BMD | 100% | 11.211.052 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Marabahan | Persentase Pengadaan BMD | 100% | 11.211.052 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan Roda 4 | Marabahan | Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | 0 Unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | Marabahan | Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | 0 Unit | 0 | |
| | Pengadaan Mebel | Marabahan | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 1 unit | 11.211.052 | Pengadaan Mebel | Marabahan | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 1 unit | 11.211.052 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Marabahan | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 0 unit | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Marabahan | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 0 unit | 0 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya | 0 unit | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya | 0 unit | 0 - | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Marabahan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100% | 47.665.648 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Marabahan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100% | 47.665.648 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------|-------------------|--|-----------|---|------------|-------------------|--|
| | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Marabahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat | 12 Laporan | 15.760.800 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Marabahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat | 12 Laporan | 15.760.800 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Marabahan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Marabahan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah | Marabahan | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 16.904.848 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah | Marabahan | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 16.904.848 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Marabahan | Persentase BMD yang terpelihara | 100% | 33.739.800 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Marabahan | Persentase BMD yang terpelihara | 100% | 33.739.800 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Marabahan | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 19 Unit | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Marabahan | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan | 19 Unit | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------|----------------------|--|------------------------|---|--------|----------------------|--|
| | | | | | | Operasional/La pangan | | pajak dan perizinannya | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 17.239.800 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 17.239.800 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Marabahan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 750.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Marabahan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 750.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 750.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Marabahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 2 Unit | 750.000 | |
| | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kabupaten Barito Kuala | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | 70% | 1.817.540.310 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kabupaten Barito Kuala | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | 70% | 1.817.540.310 | |
| | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Barito Kuala | Persentase Kecamatan yang diawasi | 100% | 1.664.916.295 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Barito Kuala | Persentase Kecamatan yang diawasi | 100% | 1.664.916.295 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------|---|--|---|------------|-------------|--|
| | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 24 Laporan | 71.138.000 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 24 Laporan | 71.138.000 | |
| | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Marabahan | Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 7 Laporan | 694.061.600 | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Marabahan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 7 Laporan | 694.061.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|------------|-------------|---|--------------------------------------|--|------------|-------------|--|
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Marabahan | Jumlah Sarana dan prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tersedia | 50 Unit | 584.146.390 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Marabahan | Jumlah Sarana dan prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tersedia | 50 Unit | 584.146.390 | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota | Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana. | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 18 dokumen | 137.358.975 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota | Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana . | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 18 dokumen | 137.358.975 | |
| | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Marabahan | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang terdampak Perda dan Perkada | 2 Layanan | 2.000.000 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Marabahan | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang terdampak Perda dan Perkada | 2 Layanan | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|
| | Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 55.091.965 | Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 55.091.965 | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Semua Kecamatan | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya | 610 Orang | 80.447.540 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Semua Kecamatan | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya | 610 Orang | 80.447.540 | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 Orang | 0 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 Orang | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|--------------------|---|---|--|------------|--------------------|--|
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar | Jumlah Dokumen Hasil Pelak+F25:F3Osana an Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 4 dokumen | 40.671.825 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar | Jumlah Dokumen Hasil Pelak+F25:F3 Osanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 4 dokumen | 40.671.825 | |
| | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Persentase Kecamatan yang diawasi | 100% | 152.624.015 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Persentase Kecamatan yang diawasi | 100% | 152.624.015 | |
| | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 27.630.140 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 27.630.140 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|------------|--------------------|--|------------------------|--|------------|--------------------|--|
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 44.993.875 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 44.993.875 | |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Marabahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Perda | 2 Unit | 79.000.000 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Marabahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Perda | 2 Unit | 79.000.000 | |
| | Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan perkara | Marabahan | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada | 24 Laporan | 1.000.000 | Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan perkara | Marabahan | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada | 24 Laporan | 1.000.000 | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Marabahan | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | 70% | 199.777.960 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Marabahan | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | 70% | 199.777.960 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|--------------------|---|-----------|---|------------------|--------------------|--|
| | Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Marabahan | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 100% | 199.777.960 | Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a | Marabahan | Persentase Penanggulang an Kebakaran dan Non Kebakaran | 100% | 199.777.960 | |
| | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Marabahan | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 4 Dokumen | 199.777.960 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a | Marabahan | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya | 4 Dokum en | 199.777.960 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja Satuan Polisi Pamong Praja juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan musrenbang, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan disajikan pada tabel 2.7 (T-C- 32):

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Barito Kuala Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel C -32

| N o | Program Kegiatan | Lokasi | Indikat or Kinerja | Besaran/Vo lume | Catatan |
|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | NIHIL | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Awal juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Arah kebijakan Nasional Tahun 2020-2025 sesuai arahan Presiden

Adalah :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur

3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transpormasi Ekonomi

Arah kebijakan satu terdiri atas :

- a. tingkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (penurunan Kematian ibu dan stunting)
- b. akses dan kualitas air minum dan sanitasi layak
- c. pendidikan dan pelatihan Vokasi
- d. penguatan bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran

Arah kebijakan dua sampai dengan lima terdiri atas :

- a. Melanjutkan dan menyambungkan pembangunan Infrastruktur dengan kawasan produksi dan sektor unggulan
- b. penguatan ekonomi kreatif dan digital
- c. memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana

Sesuai arah kebijakan nasional tersebut di atas, maka Satpol PP dalam merumuskan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang harus mendukung dan merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Terkait dengan kebijakan nasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur Pemerintah Daerah, Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2026 masih tetap memprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :

- Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.
- Penyediaan dan penambahan fasilitas pelayanan.
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan.
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.
- Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 , yaitu :

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Sakip Satpol PP

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP

Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi dan misi Kabupaten tersebut di atas, akan disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Indikator Utama | Satuan |
|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------|
| 1 | Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan | Persentase Tingkat Penyelesaian K3 | Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 | Persentase Tingkat Penyelesaian K3 | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | Persen |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Nilai Sakip Satpol PP | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | Nilai |

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Kuala

| Tujuan RPD | Sasaran RPD | Tujuan SKPD | Sasaran SKPD | Kegiatan |
|---|--|---|--|--|
| VISI : BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS | | | | |
| Misi Ke-1 | | | | |
| Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan | | | | |
| TEMA : Memacu Pendapatan dan Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah dengan SUB TEMA : Optimalisasi Pendapatan dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi | | | | |
| Meningkatkan Aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Pencegahan dan Penanggulangan | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan | Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan | 'Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 | Pembinaan,Pengawasan, Penyuluhan,Pengamanan, Pencegahan dan Penanggulangan |
| | | | | Koordinasi Pengamanan dan Pencegahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | Koordinasi Pembinaan,Pengawasan, Penyuluhan, Penindakan Perda Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah |
| | | | | Koordinasi Penanggulangan Kebakaran UPT Pemadam Kebakaran |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ditunjang dengan 3 Program, 10 Kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan Hasil Pemuktahiran Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (pembayaran TPP ASN selama 52 Orang).

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan

1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
(ASN yang mengikuti bimtek sebanyak 18 orang).

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan sebanyak 19 Paket).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (penyediaan makan minum pegawai dan rapat selama 12 bulan sebanyak 2 Paket).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan sebanyak 3 paket

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 7 Paket untuk 12 Bulan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebanyak 12 Laporan perjalanan dinas ke dalam dan luar provinsi.
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 0 unit.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pembelian 6 Unit
 - Pengadaan Mebel 20 Paket
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 10 Unit
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, melaksanakan pembayaran tenaga harian lepas selama 12 bulan untuk 1 Orang administrasi surat menyurat 252 OH dan pembelian biaya materai 10.000 sebanyak 12 laporan
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Laporan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pembelian alat kebersihan 5 jenis dan tenaga kebersihan 252 OH selama 12 Laporan.

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kendaraan dinas operasional Sebanyak 19 Unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, membayar jasa tenaga keamanan 365 OH (petugas jaga malam kantor) sebanyak 1 Unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya digunakan untuk membayar pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 4 unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya digunakan untuk membayar pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya 4 unit

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan sebanyak 12 Laporan

- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebanyak 7 Laporan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 50 Unit
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota sebanyak 18 Dokumen.
- Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada sebanyak 2 Layanan
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebanyak 12 Dokumen
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, sebanyak 0 Orang
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 610 Orang
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebanyak 4 Dokumen.

2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota.

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sebanyak 12 Laporan.
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sebanyak 12 Laporan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) sebanyak 4 Unit
- Penyidikan terhadap dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 24 Laporan

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.1 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pemadaman kebakaran bekerja sama dengan instansi lain dan instansi swasta sebanyak 4 Dokumen dan Lomba Damkar

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 (Tabel T-C.33) berikut ini :

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Sesuai PMDN 90 Tahun 2019 dan Inmendagri 70 Tahun 2021)**

Kabupaten Barito Kuala

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

T-C. 33

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (tahun rencana) | | | | Catat an Penti ng | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (tahun n+1) | |
|-------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif | Sum ber Dana | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 10.290.733 .750 | | | | 9.740.863.9 77 |
| 1 0 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 10.290.733. 750 | | | | 9.740.863. 977 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|-----------|-----------|---------------|-----|--|-----------|---------------|
| 1 | 0 | 0 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu | Marabahan | 1 Lap | 8.108.415.480 | DAU | | 1 Lap | 7.723.545.707 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu | Marabahan | 1 Lap | 6.741.243.221 | DAU | | 1 Lap | 6.589.098.469 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Marabahan | 56 Orang | 6.741.243.221 | DAU | | 56 Orang | 6.589.098.469 |
| 1 | 5 | 1 | 2.0 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu | Marabahan | 1 Laporan | 9.500.000 | DAU | | 1 Laporan | 9.500.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Marabahan | 1 Lap | 9.500.000 | DAU | | 1 Lap | 9.500.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Realisasi kepegawaian | Marabahan | 100% | 39.801.000 | DAU | | 100% | 39.801.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|-----|--|-------------|--------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang | Jakarta dan Bandung' | 18 Orang | 39.801.000 | DAU | | 18 Orang | 39.801.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Realisasi administrasi Umum | Marabahan | 100% | 690.198.411 | DAU | | 100% | 460.534.590 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | Marabahan | 19 Paket | 51.835.500 | DAU | | 19 Paket | 51.835.500 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Marabahan | 7255 Paket | 184.670.000 | DAU | | 7255 Paket | 184.670.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Marabahan | 3 Paket | 1.500.000 | | | 3 Paket | 1.500.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Marabahan | 7 Paket | 11.624.090 | DAU | | 7 Paket | 11.624.090 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Banjarbaru, Jakarta, Bandung | 12 Laporan | 440.568.821 | DAU | | 12 Laporan | 210.905.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|-----|----|--|---|-----------|------------|------------|-----|--|------------|------------|
| 1 | 0517 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi BMD | Marabahan | 100% | 30.250.000 | DAU | | 100% | 30.250.000 |
| 1 | 0517 | 01 | 2.0 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | Marabahan | 0 Unit | 0 | DAU | | 0 Unit | |
| 1 | 0517 | 01 | 2.0 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Marabahan | 20 Paket | 30.250.000 | DAU | | 20 Paket | 30.250.000 |
| 1 | 0517 | 01 | 2.0 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Marabahan | 5 Paket | 0 | DAU | | 5 Paket | |
| 1 | 0517 | 01 | 2.0 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya | Marabahan | 2 Paket | 0 | DAU | | 2 Paket | |
| 1 | 0518 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang | Marabahan | 100% | 85.264.848 | DAU | | 100% | 82.203.648 |
| 1 | 0518 | 01 | 2.0 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat | Marabahan | 12 Laporan | 28.329.600 | DAU | | 12 Laporan | 26.218.800 |
| 1 | 0518 | 01 | 2.0 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Marabahan | 12 Laporan | 44.080.000 | DAU | | 12 Laporan | 44.080.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|------------------|------------|-------------|-----|--|------------|-------------|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Marabahan | 12 Laporan | 12.855.248 | DAU | | 12 Laporan | 11.904.848 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang terpelihara | Marabahan | | 512.158.000 | DAU | | | 512.158.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Marabahan | 18 Unit | 453.568.600 | DAU | | 18 Unit | 453.568.600 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi | Marabahan | 1 Unit | 46.589.400 | DAU | | 1 Unit | 46.589.400 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Marabahan | 4 Unit | 6.000.000 | DAU | | 4 Unit | 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|----|--|--|--|--|------------|----------------------|-----|--|------------|----------------------|
| 1 | 0519 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Marabahan | 2 Unit | 6.000.000 | DAU | | 2 Unit | 6.000.000 |
| 1 | 052 | | | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | Kabupaten Barito Kuala | 100% | 1.817.540.310 | DAU | | 100% | 1.817.540.310 |
| 1 | 052 | 2.01 | | | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kecamatan yang diawasi | Kabupaten Barito Kuala | 100% | 1.669.731.390 | DAU | | 100% | 1.669.731.390 |
| 1 | 052 | 2.01 | 01 | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana | 24 Laporan | 71.138.000 | DAU | | 24 Laporan | 71.138.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|------------|-------------|-----|--|------------|-------------|
| | | | | | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Marabahan | 7 Laporan | 737.604.925 | DAU | | 7 Laporan | 737.604.925 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana. | 18 dokumen | 137.358.975 | DAU | | 18 dokumen | 137.358.975 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | 12 Dokumen | 55.091.965 | DAU | | 12 Dokumen | 55.091.965 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|-----------|-------------|-----|--|-----------|-------------|
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar. | 610 Orang | 340.091.900 | DAU | | 610 Orang | 340.091.900 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar | 4 dokumen | 328.445.625 | DAU | | 4 dokumen | 328.445.625 |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota | Persentase Kecamatan yang diawasi | Kabupaten Barito Kuala | 100% | 147.808.920 | DAU | | 100% | 147.808.920 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------------------------|------------|-------------|-----|--|------------|-------------|
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kabupaten Barito Kuala | 12 Laporan | 49.965.175 | DAU | | 12 Laporan | 49.965.175 |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Kabupaten Barito Kuala | 12 Laporan | 97.843.745 | DAU | | 12 Laporan | 97.843.745 |
| 1 | 05 | 04 | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | Marabahan | 100% | 364.777.960 | DAU | | 100% | 199.777.960 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----|--|--|-----------|--------------|-------------|-----|--|--------------|-------------|
| 1 | 054 | 2.01 | | Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Marabahan | 100% | 364.777.960 | DAU | | 100% | 199.777.960 |
| 1 | 054 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Marabahan | 4 Dokumen | 364.777.960 | DAU | | 4 Dokumen | 199.777.960 |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Satuan Polisi Pamong Praja merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk Optimalisasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Prajaya mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Selanjutnya rencana program dan kegiatan diuraikan dalam format Draf Rancangan awal Rencana Renja sebagaimana tabel terlampir.

Satuan Polisi Pamong Prajatelah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 - 2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Program dan Kegiatan

Rencana kerja Awal dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan. Untuk rencana Kerja Program dan kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja (TPP) 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 9.303.238.236,00

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan dengan 1 laporan dengan anggaran Rp. 9.500.000,00

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan 0 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 0,00

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.034.410,00 untuk belanja/biaya alat tulis kantor 19 paket

Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.820.000,00 untuk belanja/biaya makan dan minum harian pegawai, rapat dan rapat tamu sebanyak 2 paket.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000,00 untuk belanja alat listrik sebanyak 3 Paket

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00 Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetak dan penggandaan 7 Paket .

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.779.090,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 12 Laporan

4. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00 Kegiatan ini melaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional 0 unit.

Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.211.052,00 melaksanakan pembelian kursi dan meja 2 unit dan.

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00 untuk pengadaan Komputer 0 Unit dan printer 0 unit.

Pengadaan Sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya AC 0 unit , Filling kabinet 0 unit senilai Rp. 0,00

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyediaan Jasa Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.760.800,00 kegiatan ini melaksanakan belanja materai dan belanja jasa administrasi perkantoran 1 orang/252 OH.

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00 . Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 Laporan .

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kebersihan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.904.848,00 . Kegiatan ini melaksanakan pembelian peralatan dan pembayaran jasa kebersihan kantor 1 orang sebanyak 12 Laporan

5 Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sebanyak 19 unit.

Pemeliharaan rutin /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.239.800,00 1 unit. Kegiatan ini melaksanakan pembelian obat semprot 5 botol dan pembayaran jasa petugas jaga malam 1 Orang .

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00 sebanyak 4 unit. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan Laptop dan Pc. Unit.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00. Sebanyak 2 unit' Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan AC .

B. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 71.138.000,00. Kegiatan ini adalah melakukan patroli dan penertiban pada wilayah kecamatan guna mencegah terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada, selain itu juga melakukan penertiban pada pelanggar Perda atau Perkada yang melakukan aktivitas sebanyak 24 Laporan.

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Kegiatan ini merupakan petugas pengendali keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dibayarkan setiap bulan untuk melakukan penertiban dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dianggarkan sebesar Rp. 694.061.600,00 sebanyak 7 Laporan

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pengamanan pada kegiatan Kepala daerah atau wakil Kepala Daerah dan pejabat lainnya yang mana untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat berlangsungnya kegiatan dengan tertib dan terkendali sebanyak 18 Dokumen dianggarkan Rp. 137.358.975,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 50 Unit Rp. 584.146.390,00

Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

Kegiatan ini melakukan layanan dasar dalam rangka penegakan Perda dan Perkada sebanyak 2 Layanan Rp. 2.000.000,00

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini melakukan pembentukan Satlinmas di Kecamatan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sebanyak 12 Dokumen dianggarkan sebesar Rp. 55.091.965,00

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan Pelatihan Satlinmas yang ada di Kecamatan atau desa dalam rangka peningkatan kapasitas Satlinmas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan setempat sebanyak 0 Orang dianggarkan sebesar Rp. 0,00.

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Satlinmas yang ada di Kecamatan atau desa dalam rangka peningkatan kapasitas Satlinmas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan setempat sebanyak 610 Orang dianggarkan sebesar Rp. 80.447.540,00.

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kerjasama instansi terkait ataupun pihak keamanan lainnya seperti Kepolisian maupun TNI dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 4 dokumen dianggarkan sebesar Rp. 40.671.825,00

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi masyarakat atau badan usaha yang diduga melanggar Perda atau Perkada sebanyak 12 Laporan dianggarkan sebesar Rp. 27.630.140,00

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan melakukan penyelidikan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Perda atau Perkada sebanyak 12 Laporan dianggarkan sebesar Rp. 44.993.875,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

Kegiatan ini melakukan pembelian pengadaan Sarana dan Prasarana kegiatan penegakan Perda sebanyak 2 Unit Rp. 79.000.000,00

Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan Perkada

Kegiatan ini melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 24 Laporan Rp. 1.000.000,00

**C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN**

*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini melakukan pembinaan pencegahan bahaya kebakaran melalui Pembinaan APAR pada Instansi , Kecamatan, penanggulangan kebakaran dan pelatihan anggota Pemadam Kebakaran dan kegiatan Lomba Ketangkasan Damkar sebanyak 4 Dokumen dan Alat Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp. 199.777.960,00

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana Kerja Awal Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026, Rencana Kerja Awal juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Jumlah program kegiatan-sub kegiatan pada tahun 2026 adalah 3 program, 10 kegiatan, dan 34 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp 11.334.863.977,-

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, maka ditetapkan kaidah –kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang.
- b. Di dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatu Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- c. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

- d. Terwujudnya kondisi tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran Perda yang dilaporkan
- e. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Bupati Kab.Barito Kuala yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas
- g. Melakukan koordinasi dengan Forcopimcam dalam pelaksanaan pengamanan dan keamanan di wilayah Kecamatan

Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang.
- c. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

- d. Meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Operasi di lapangan dalam bentuk razia, penertiban, pembinaan, patroli rutin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran perda dan gangguan trantibum.
- b. Koordinasi dengan para Camat se Kabupaten Barito Kuala dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Barito Kuala
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai penambahan SARPRAS
- d. Melakukan Sosialisai tentang Perda dan Perkada di lingkungan Sekolah se Kabupaten Barito Kuala
- e. Melakukan kegiatan Patroli Malam di tempat-tempat keramaian dan RTH di Kabupaten Barito Kuala
- f. Melakukan penertiban terhadap PKL di jalur hijau
- g. Mengikuti Diklat PPNS
- h. Memaksimal sarana dan prasarana yang ada

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP

Pembina TK. I / IVb

NIP. 198204142001121001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALAKAB. BARITO KUALA

TAHUN 2026

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|----|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA | | | | | | 11.620.556.506,00 | | | | | | | 13.808.822.659,00 | |
| | 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 11.620.556.506,00 | | | | | | | 13.808.822.659,00 | |
| | 1 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 11.620.556.506,00 | | | | | | | 13.808.822.659,00 | |
| 1 | 1 | 05 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP | - | | | 81 Nilai | 9.603.238.236,00 | | | | | | - | 10.562.065.874,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu | - | | | 1 Laporan | 9.500.000,00 | | | | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | - | 10.500.000,00 |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian | | | | 1 Laporan | 9.500.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 10.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|--|--------------------------------------|---|--|------------|---------------|--|-------------------------|---|---|------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 11.211.052,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN dan Masyarakat | | 130.250.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | - | | 100 Persen | 47.665.648,00 | | | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | - | 101.203.648,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 15.760.800,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 36.218.800,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 49.080.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 16.904.848,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 15.904.848,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|---------------------------------|---|--|--|------------|---------------|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|----------------|--|
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang terpelihara | - | | | 100 Persen | 33.739.800,00 | | | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayakat | - | 354.339.400,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 19 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayakat | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | | 4 Unit | 750.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayakat | | 7.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | 1 Unit | 17.239.800,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayakat | | 146.589.400,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | | | | | 2 Unit | 750.000,00 | Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayakat | | 750.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|------|--|--|---|--|------------|------------------|--|-------------------------|---|---|------------------------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | Benteng | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | - | | 70 Persen | 1.817.540.310,00 | | | | | | | - | 3.026.778.825,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kecamatan yang diawasi | - | | 100 Persen | 1.664.916.295,00 | | | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | - | 2.056.969.905,00 | | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 18 Dokumen | 137.358.975,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 137.358.975,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman | | | | 12 Dokumen | 55.091.965,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 65.091.965,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|--|--|--|-----------|----------------|--|-------------------------|---|---|------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 7 Laporan | 694.061.600,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 694.061.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | | | | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 200.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | | | | 50 Unit | 584.146.390,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan Masyarakat | | 992.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|--|---|--|--|------------|----------------|--|-------------------------|---|---|-------------------------------|---|----------------|--|
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | - | | | 100 Persen | 152.624.015,00 | | | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayarakat | - | 969.808.920,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah | | | | | 2 unit | 79.000.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayarakat | | 542.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | 24 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayarakat | | 80.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | | | 12 Laporan | 44.993.875,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsayarakat | | 197.843.745,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|------|---|--|---|--|------------|----------------|--|-------------------------|---|---|------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 27.630.140,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsyarakat | | 149.965.175,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |
| 3 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 | - | | 70 Persen | 199.777.960,00 | | | | | | - | 219.977.960,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanggulangan Kebakaran | - | | 100 persen | 199.777.960,00 | | | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsyarakat | - | 219.977.960,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah | | | | 4 Dokumen | 199.777.960,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN SATPOL PP dan MAsyarakat | | 219.977.960,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA |

